

KATALOG: 9201012.7315

INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN PINRANG 2022 / 2023



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG

INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN PINRANG

2022 / 2023



INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI

KABUPATEN PINRANG 2022 / 2023

Nomor Publikasi : 73150.2322
Katalog : 9201012.7315
ISSN : 2797-2771
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : x+51 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Gambar Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Sumber : *freepik.com*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Joko Siswanto, SST

Penyunting

Sunarti, S.Si

Penulis

Thomi Hartono, S.Tr.Stat

Pengolah data

Thomi Hartono, S.Tr.Stat

Pembuat Infografis

Thomi Hartono, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Pembuatan publikasi ini didasarkan akan semakin meningkatnya kesadaran pengguna data di Kabupaten Pinrang akan data yang bersifat universal/umum, update dan strategis berkaitan tentang data sosial ekonomi di Kabupaten Pinrang.

Data yang dicakup dalam publikasi ini antara lain kependudukan, tenaga kerja, PDRB, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan data kemiskinan.

Akhirnya semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk seluruh pengguna data. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam terciptanya publikasi ini. Kritik dan saran sangat ditunggu untuk perbaikan publikasi-publikasi berikutnya.

Pinrang, September 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang



Joko Siswanto

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VII
Daftar Tabel	IX
Daftar Grafik	XI
Penjelasan Teknis	1
Penduduk & Tenaga Kerja	9
Pertumbuhan Ekonomi	23
Indeks Pembangunan Manusia	35
Kemiskinan Penduduk	47
Daftar Pustaka	51

DAFTAR TABEL

No Tabel	Nama Tabel	Hal
1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022	9
1.2	Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Tahun 2022	10
1.3	Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022	11
1.4	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022	14
1.5	TPAK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022	15
1.6	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018-2022	16
1.7	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Tahun 2020-2022	17
1.8	TPT Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	19
2.1	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2022**)	24
2.2	PDRB Pinrang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (milyar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Kabupaten Pinrang Tahun 2021*-2022**)	25
2.3	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2022**)	26
2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (Persen)	28
2.5	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	29
2.6	PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan Tahun 2021-2022 (miliar rupiah)	30
2.7	Peranan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2022 (Persen)	31
3.1	IPM dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	36
3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022	38
3.3	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022	39
3.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022	41
3.5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2022	43

No Tabel	Nama Tabel	Hal
4.1	Statistik Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	47
4.2	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022	48

<https://pinrangkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

No Grafik	Nama Grafik	Hal
1.1	Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2022	10
1.2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2022	13
1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	14
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	18
2.1	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen)	23
2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 (Persen)	27
3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2022	38
4.1	Persentase Penduduk Miskin kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	48



PENGENGETIHAN

Penduduk

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Produk Domestik Regional Bruto

Penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Output

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. *Output* tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output. Oleh karenanya secara matematis nilai tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{NTB} &= \text{Output} - \text{Input antara} \\ \text{NTB} &= \text{nilai tambah bruto} \end{aligned}$$

Biaya Antara

Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara.

Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (*y on y*)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponennya itu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

GK= GKM + GKNM

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Ukuran Kemiskinan

- Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gini Ratio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Usia Kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas usia kerja.

Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

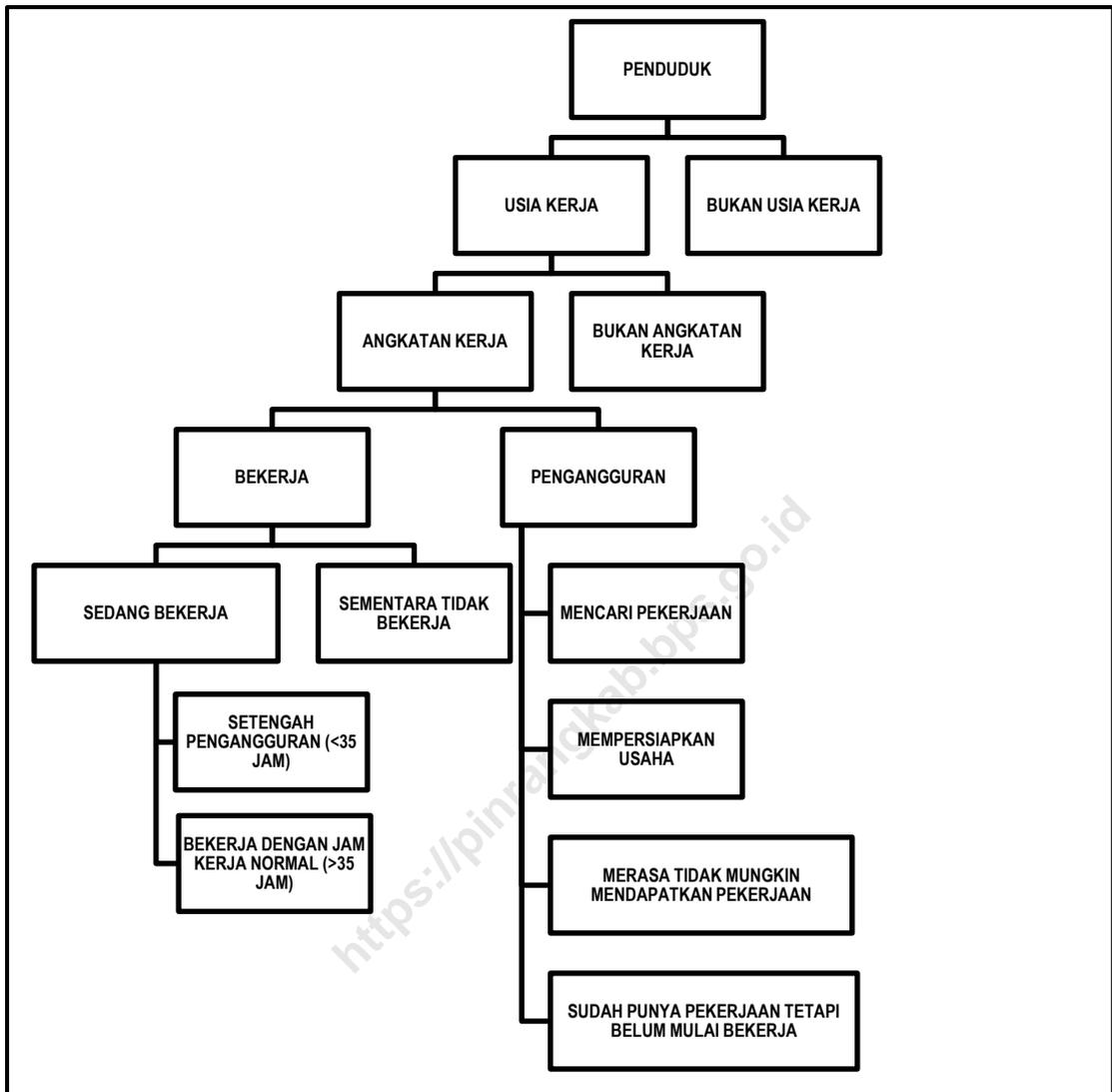
Bekerja

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Pengangguran

Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

Diagram Ketenagakerjaan



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan rata-rata dari indeks longevity, indeks pendidikan dan indeks tingkat hidup layak. Terdapat 4 indikator (dari 3 dimensi) pembentuk angka IPM :

1. Dimensi Kesehatan diukur dengan indikator : Angka Harapan Hidup,

2. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator : Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,

3. Dimensi Hidup Layak diukur dengan indikator : Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$); (2) Tinggi ($70 \leq IPM < 80$); (3) Sedang ($60 \leq IPM < 70$); (4) Rendah ($IPM < 60$). Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_t} \times 100$$

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

PENDUDUK & TENAGA KERJA

203.367
Laki-laki



208.428
Perempuan

Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2022 sebesar 411.795 jiwa rasio jenis kelamin sebesar 97,57

Rasio ketergantungan Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebesar 46,25 persen. Artinya dari 100 orang usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung 46 - 47 orang usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).



TPAK 57,72%

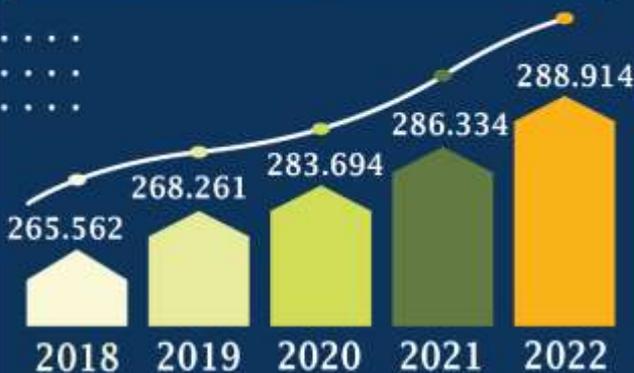


TPT 2,79%

artinya dari 100 penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja terdapat sekitar 2-3 orang yang menjadi pengangguran

artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 57 - 58 orang diantaranya termasuk angkatan kerja dan sisanya tergolong bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja tetapi mempunyai kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain.

Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2022



TPAK 66,18%
TPT 4,51%

Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah penduduk yang dihasilkan oleh BPS telah mengacu pada konsep dan definisi yang telah disepakati internasional. Oleh karena itu, angka yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan diperbandingkan antar negara. Penduduk didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	17.364	16.617	33.981	104,50
5 - 9	16.424	15.725	32.149	104,45
10 - 14	17.885	16.680	34.565	107,22
15 - 19	17.962	17.262	35.224	104,06
20 - 24	17.730	17.159	34.889	103,33
25 - 29	16.353	16.229	32.582	100,76
30 - 34	15.581	15.802	31.383	98,60
35 - 39	15.194	15.298	30.492	99,32
40 - 44	14.147	14.622	28.769	96,75
45 - 49	12.727	13.502	26.229	94,26
50 - 54	12.102	13.134	25.236	92,14
55 - 59	9.911	11.013	20.924	89,99
60 - 64	7.365	8.475	15.840	86,90
65 - 69	5.422	6.507	11.929	83,33
70 - 74	3.581	4.944	8.525	72,43
75 +	3.619	5.459	9.078	66,29
Jumlah	203.367	208.428	411.795	97,57

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021 - 2023, BPS

Jumlah penduduk yang besar pada suatu wilayah dapat menjadi suatu modal ataupun beban bagi pembangunan wilayah tersebut. Penduduk akan menjadi beban dalam pembangunan apabila jumlah penduduk yang besar tetapi penduduk tersebut memiliki kualitas yang rendah. Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk perempuan (208.428) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki (203.367) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 97,57 di Kabupaten Pinrang. Diharapkan, dengan diperolehnya data penduduk Kabupaten Pinrang yang akurat, maka dapat teridentifikasinya berbagai permasalahan mengenai kependudukan yang terjadi secara riil di masyarakat, mulai dari masalah jumlah, persebaran hingga komposisi penduduk yang tidak merata antara kota dan desa.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Tahun 2022

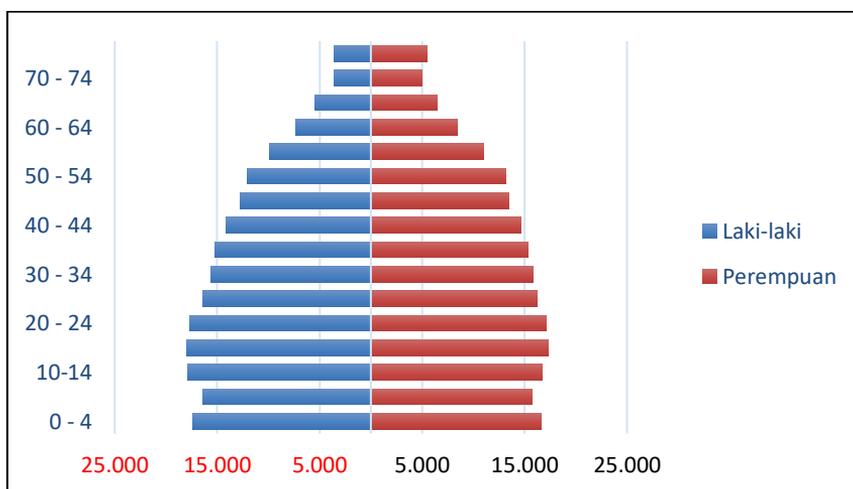
Kelompok Umur	Jenis Kelamin (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 14	25,41	23,52	24,45
15 – 64	68,38	68,37	68,38
65+	6,21	8,11	7,17
Jumlah Penduduk	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021 – 2023, BPS

Penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2022 tercatat sebagian besar berada dalam kelompok usia produktif yaitu 15-64 tahun sekitar 68,38 persen (Tabel 1.2). Dari Tabel 1.2 yang kemudian dilakukan penghitungan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau lebih dikenal dengan angka beban ketergantungan. Rasio ketergantungan Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebesar 46,25 persen. Artinya dari 100 orang usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung 46 - 47 orang usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa persentase penduduk usia produktif perempuan (68,37 persen) lebih kecil dibanding laki-laki (68,38 persen), begitu pula pada usia tidak produktif (kelompok umur 0-14) persentase penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Sedangkan untuk usia tidak produktif (kelompok umur 65+), persentase penduduk perempuan (8,11 persen) lebih besar dibanding persentase penduduk laki-laki (6,21 persen). Data ini dapat menggambarkan komposisi penduduk di Kabupaten Pinrang yang cenderung lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan perempuan untuk kelompok umur di bawah 65 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat dijadikan informasi tambahan bagi otoritas pemangku dalam menyusun kebijakan yang mengoptimalkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2022



Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021–2023, BPS

Melihat bentuk piramida penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2022 cenderung seperti jenis piramida muda (ekspansif) yang biasanya berada di negara-negara berkembang. Bentuk piramida ini ditandai dengan suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga wilayah ini biasanya mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Piramida ini ditandai juga dengan sebagian besar penduduknya masuk ke dalam kelompok umur muda. Adapapun ciri khusus dari jenis piramida ini antara lain:

- Jumlah penduduk usia muda (0-19 tahun) sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.
- Pertumbuhan penduduk relatif tinggi.
- Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Cina, Mesir, dan India.

Selanjutnya, Tabel 1.3 menampilkan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada setiap kecamatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto. Sebaliknya, jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Batulappa meskipun tren jumlah penduduknya naik setiap tahun.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suppa	32.362	32.580	34.434	34.656	34.965
Mattiro Sompe	28.718	28.911	30.155	30.270	30.461
Lanrisang	17.885	18.004	19.713	19.877	20.092
Mattiro Bulu	28.429	28.620	31.524	31.848	32.255
Watang Sawitto	56.329	56.713	56.570	56.827	57.227
Paleteang	40.655	40.934	42.630	43.024	43.528
Tiroang	22.410	22.561	23.409	23.547	23.744
Patampanua	33.336	33.562	37.577	38.018	38.559
Cempa	18.213	18.337	19.543	19.679	19.866
Duampanua	46.049	46.358	50.226	50.618	51.139
Batulappa	10.161	10.232	11.281	11.392	11.532
Lembang	40.036	40.307	46.932	47.615	48.427
Pinrang	374.583	377.119	403.994	407.371	411.795

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023, BPS

Para pengguna data kependudukan, khususnya para perencana, dan pengambil kebijakan sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, sumber data penduduk yang tersedia hanya secara periodik, yaitu Sensus Penduduk (SP) pada tahun yang berakhir dengan angka 0 (nol) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada pertengahan dua sensus atau tahun-tahun yang berakhir dengan angka 5 (lima). Untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang ideal maka seharusnya membutuhkan pendataan

lengkap yakni sensus penduduk secara periodik tahunan. Tetapi kegiatan sensus penduduk di Indonesia secara umum belum dapat dilakukan secara tahunan, ditambah sumber data kependudukan lain yaitu registrasi penduduk masih belum sempurna cakupannya sehingga datanya belum dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, mengacu amanat undang-undang tentang statistik maka pelaksanaannya hanya dilakukan 10 tahun sekali, BPS telah melaksanakannya mulai tahun 1970 hingga yang terakhir tahun 2020.

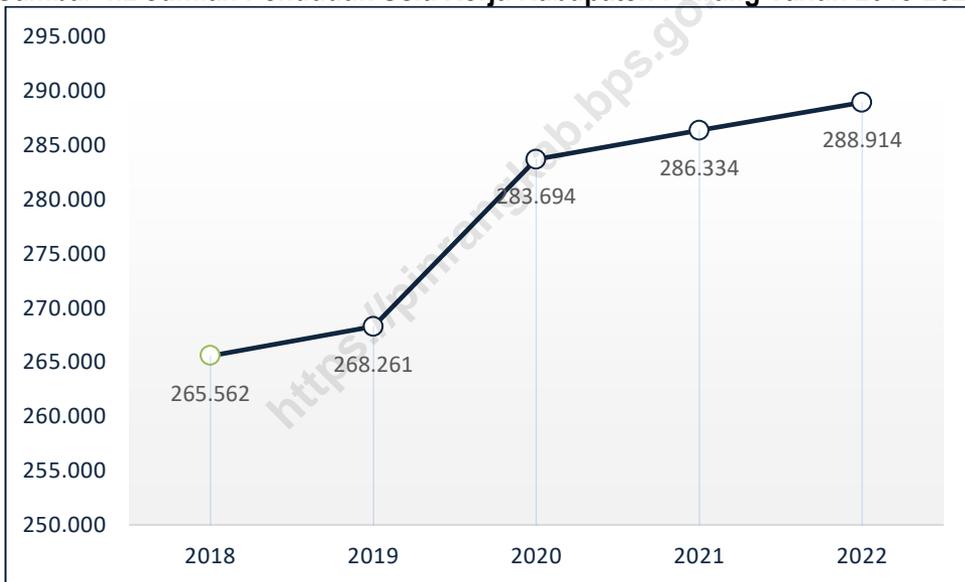
Suatu perencanaan yang berkaitan dengan rakyat pastilah harus ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan komposisinya menurut kelompok umur penduduk yang relevan. Oleh karena sensus yang dilaksanakan oleh BPS hanya setiap 10 tahun sekali, maka dilakukan proyeksi penduduk dengan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang.

Secara umum berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2021-2023, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 menempati urutan kelima terbesar di Sulawesi Selatan. Tercatat jumlah penduduk sebesar 411.795 jiwa. Jika melihat persebaran jumlah penduduk terlihat bahwa penduduk Kabupaten Pinrang sebagian besar berada di ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Watang Sawitto dengan jumlah penduduk 57.227 jiwa atau 13,90 persen. Keadaan ini tidak mengherankan dikarenakan Kecamatan Watang Sawitto merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Pinrang. Sedangkan, tiga kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terendah adalah Batulappa, Lanrisang dan Cempa karena cakupan wilayah yang relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan yang lain.

Kebutuhan dasar selain sandang, pangan dan papan adalah pekerjaan. Status bekerja tidak hanya merupakan status sosial di masyarakat tetapi jauh lebih dari itu merupakan ibadah dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Indikator ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk mengevaluasi perencanaan pembangunan suatu daerah dalam hal penyerapan tenaga kerja sekaligus produktifitas tenaga kerja.

Perlu diakui pekerjaan adalah motor perekonomian, apabila perekonomian ini tidak mampu menyerap tenaga kerja maka akan menciptakan pengangguran dan akibatnya akan timbul masalah-masalah sosial di masyarakat. Tren jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang terus meningkat dari tahun 2018 sampai 2022. Penduduk usia kerja paling tinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 288.914 jiwa. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 288.914 jiwa.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pinrang

Selain itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas dapat digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan, yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya yang dijelaskan pada tabel di bawah (Tabel 1.4). Tabel 1.4 menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2022 sebanyak 162.105 jiwa. Dibandingkan tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 cenderung menurun cukup signifikan sebesar 1,27 persen poin yang menandakan bahwa keberhasilan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengurangi angka pengangguran.

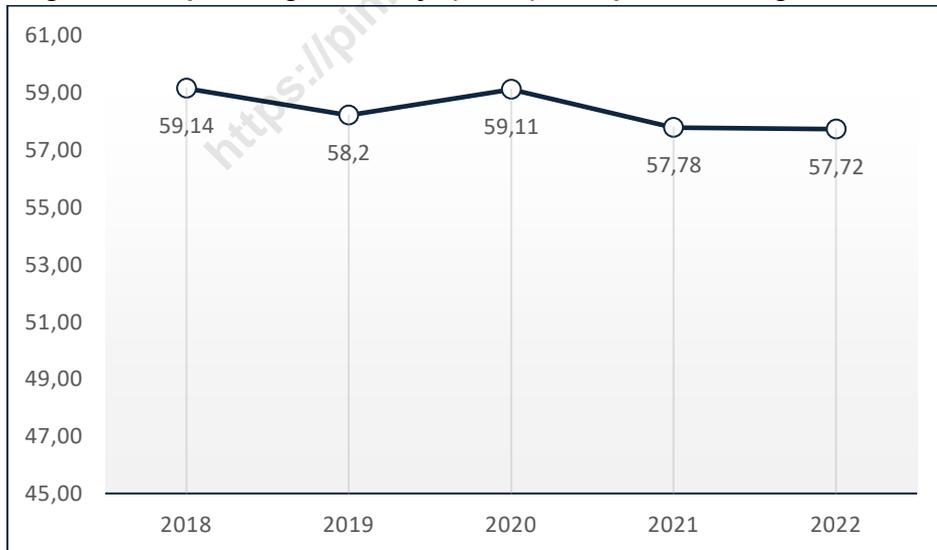
Tabel 1.4 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2022

Kegiatan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	167.701	165.431	166.763
Bekerja	160.681	158.714	162.105
Penganggur	7.020	6.717	4.658
Bukan Angkatan Kerja	115.993	120.903	122.151
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	59,11	57,78	57,72
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	4,06	2,79

Sumber : BPS Pinrang

Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jumlah tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa dalam suatu perekonomian. Menurut data Sakernas yang dihasilkan oleh BPS diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Pinrang tahun 2022 sebesar 57,72 persen yang artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 57-58 orang diantaranya termasuk angkatan kerja dan sisanya tergolong bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja tetapi mempunyai kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 57,78 persen.

Gambar 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pinrang

Selama periode tahun 2018-2022, TPAK Kabupaten Pinrang cenderung mengalami penurunan meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami kenaikan. Gambar 1.3 menunjukkan TPAK tahun 2022 sebesar 57,72 atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Pinrang menurun walaupun tidak terlalu signifikan.

Tabel 1.5 TPAK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	T P A K				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Selayar	66,16	64,81	68,18	69,07	69,93
Bulukumba	63,29	67,02	68,26	65,46	65,27
Bantaeng	71,44	71,78	73,14	74,32	75,36
Jeneponto	67,71	66,41	68,87	67,39	75,26
Takalar	65,30	63,21	62,80	65,84	64,46
Gowa	67,42	65,64	67,62	68,89	73,16
Sinjai	68,80	65,18	69,90	71,91	63,34
Maros	59,63	62,90	62,43	59,61	61,37
Pangkep	63,50	61,22	63,85	64,43	74,66
Barru	56,73	58,55	57,18	58,14	62,36
Bone	57,30	59,84	60,57	65,67	67,48
Soppeng	63,64	57,47	57,05	58,94	61,90
Wajo	59,12	62,38	65,99	64,58	61,13
Sidrap	56,22	55,39	56,92	58,70	57,63
Pinrang	59,14	58,20	59,11	57,78	57,72
Enrekang	67,25	68,95	70,80	72,64	72,05
Luwu	61,79	64,69	61,02	64,22	67,74
Tana Toraja	79,71	78,50	73,25	77,99	85,11
Luwu Utara	63,90	70,40	58,61	63,07	72,23
Luwu Timur	71,21	66,52	72,36	73,14	71,51
Toraja Utara	71,86	70,51	67,50	71,56	68,84
Makassar	59,49	57,55	58,05	59,70	59,27
Parepare	64,09	63,27	65,53	66,94	63,62
Palopo	58,31	60,49	61,23	59,95	63,65
Sulawesi Selatan	63,02	62,90	63,40	64,73	66,18

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Sedangkan pada tingkat provinsi, TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2022 berada diposisi 23 atau dua terakhir dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dan nilai TPAK tersebut dibawah rata-rata TPAK Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 66,18 persen (Tabel 1.5). Artinya keterlibatan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Pinrang masih dibawah rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan. Sehingga perlu peran serta semua pihak untuk dapat meningkatkan keterlibatan tenaga kerja dalam perekonomian.

Tabel 1.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018-2022

Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	58.232	55.000	65.305	59.887	64.504
Industri	12.790	26.625	27.421	27.487	26.179
Jasa	81.255	69.641	67.955	71.340	71.422
Total	152.277	151.266	160.681	158.714	162.105

Sumber: BPS Pinrang

Lapangan pekerjaan merupakan bidang kegiatan atau sektor dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Sedangkan, lapangan pekerjaan utama adalah sektor pekerjaan yang paling banyak menghabiskan waktu dalam bekerja dan paling besar dalam memperoleh pendapatan.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten besar di Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu penyumbang *share* perekonomian terbesar pula. Potensi daerah yang terdapat di laut dan tanahnya yang relatif subur menyebabkan sektor pertanian cukup menonjol. Kabupaten Pinrang adalah salah satu andalan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil pertanian padi dan bahkan disebut sebagai lumbung padi dan perikanan terutama perikanan tangkap dan budidaya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2022 sebesar 64.504 jiwa. Jika dilihat dari persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2022 sebesar 39,79 persen dari total penduduk berumur 15 tahun yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 2,06 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana persentase penduduk berumur 15 tahun yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 37,73 persen. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Pinrang yang bergantung pada sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk sektor industri, tahun 2022 menyerap tenaga kerja sebesar 26.179 jiwa atau sebesar 16,15 persen dari total penduduk berumur 15 tahun yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada sektor industri ini mengalami penurunan sebesar 1,18 persen poin dibandingkan tahun 2021. Untuk sektor jasa, tahun 2022 tetap menyerap tenaga kerja paling besar (44,06 persen), meskipun begitu persentase tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,9 persen poin.

Tabel 1.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Tahun 2020-2022

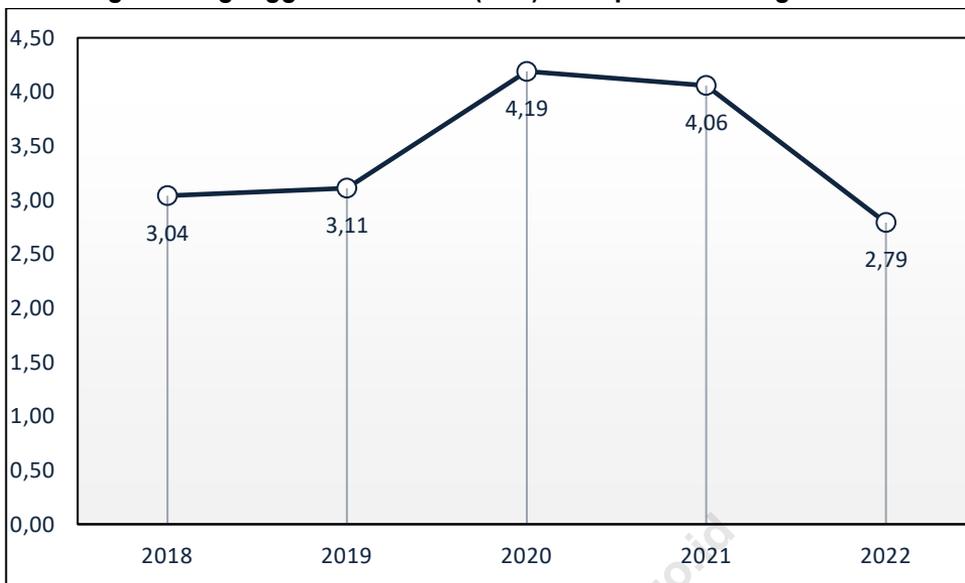
Kegiatan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	47.180	44.946	43.735
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar	34.565	33.653	43.370
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	9.779	6.256	7.592
Pekerja/Buruh/Karyawan	44.740	48.458	46.421
Pekerja Bebas	3.757	4.494	1.699
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	20.660	20.907	19.288
Total	160.681	158.714	162.105

Sumber: BPS Pinrang

Berdasarkan Tabel 1.7 yang menjelaskan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan didominasi oleh status buruh/karyawan yaitu sebesar 28,64 persen dari total penduduk yang bekerja atau sekitar 46.421 penduduk pada tahun 2022. Status pekerjaan yang berusaha sendiri mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 43.735 penduduk atau 26,98 persen dari total penduduk yang bekerja. Status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 5,55 persen poin jika dibandingkan tahun 2021. Penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar pada tahun 2022 sebesar 43.370 atau 26,75 persen dari total penduduk yang bekerja. Untuk status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 7.592 penduduk atau 4,68 persen dari total penduduk yang bekerja.

Selanjutnya, status pekerjaan pekerja/buruh/karyawan mengalami penurunan sebesar 1,90 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk persentase pekerja bebas baik di bidang pertanian maupun non pertanian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,78 persen poin. Penduduk yang berstatus pekerja bebas pada tahun 2022 sebesar 1.699 penduduk atau 1,05 persen dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan untuk persentase pekerja keluarga atau tak dibayar mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 1,27 persen poin. Penduduk yang berstatus pekerja keluarga/tak dibayar pada tahun 2022 sebanyak 19.288 penduduk atau 11,90 persen dari total penduduk yang bekerja. Fenomena yang terjadi sejak tiga tahun terakhir adalah masa pemulihan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan pergeseran kondisi tenaga kerja. Selama tiga tahun terakhir semakin banyak penduduk yang berstatus berusaha baik itu berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar maupun berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Hal ini menunjukkan banyak penduduk beralih membuka usaha untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup.

Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pinrang

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pinrang dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi (Gambar 1.4). Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Pinrang sebesar 3,04 persen dan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Pinrang sebesar 4,19 persen dimana mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen poin dibandingkan tahun 2019, kenaikan ini dikarenakan faktor pandemi *covid-19* yang menyebabkan penduduk usia kerja menjadi menganggur. Pada tahun 2021, nilai TPT Kabupaten Pinrang mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan menjadi 4,06 persen, turun sebesar 0,13 persen poin dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 TPT Kabupaten Pinrang mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 2,79 persen, turun sebesar 1,27 persen poin dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini karena terjadi pemulihan perekonomian Kabupaten Pinrang pasca pandemi *covid-19*. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang mampu menjaga kestabilan perekonomian pasca pandemi *covid-19*. Nilai TPT sebesar 2,79 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 2-3 orang merupakan pengangguran.

Tabel 1.8 TPT Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

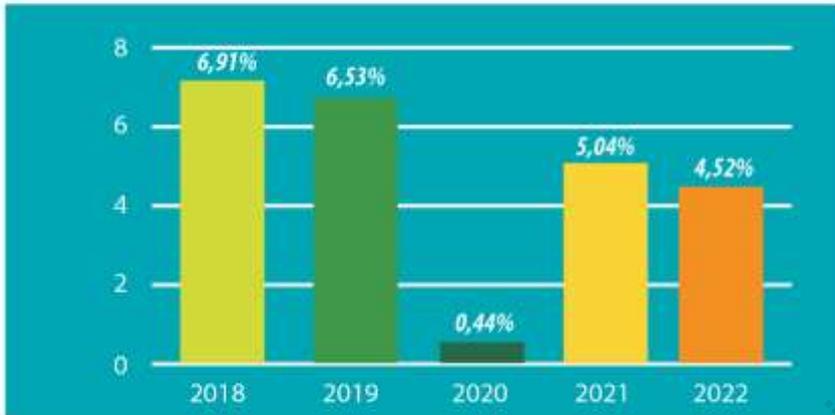
Kabupaten/Kota	T P T				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Selayar	1,88	1,17	2,44	2,81	1,49
Bulukumba	3,62	3,31	3,42	3,14	1,26
Bantaeng	3,69	3,98	4,27	4,07	2,72
Jeneponto	2,81	2,12	2,31	2,38	2,21
Takalar	3,88	4,13	4,16	3,93	2,63
Gowa	4,80	4,87	6,44	4,30	3,26
Sinjai	2,14	2,28	2,65	2,61	1,80
Maros	6,19	4,71	6,28	6,30	5,04
Pangkep	6,91	5,41	5,18	5,86	5,23
Barru	5,38	5,79	6,39	6,74	5,32
Bone	2,82	3,25	3,20	4,15	2,27
Soppeng	2,66	3,53	4,42	3,92	3,40
Wajo	3,79	3,30	4,33	4,32	2,54
Sidrap	4,70	4,75	5,91	4,93	3,56
Pinrang	3,04	3,11	4,19	4,06	2,79
Enrekang	1,66	2,4	2,44	2,34	0,58
Luwu	3,89	4,66	4,94	4,80	3,85
Tana Toraja	3,07	2,74	2,60	3,09	2,32
Luwu Utara	3,87	3,04	3,01	3,91	2,81
Luwu Timur	2,18	4,08	4,46	4,96	4,48
Toraja Utara	2,88	3,00	3,17	2,61	1,99
Makassar	12,19	10,39	15,92	13,18	11,82
Parepare	6,81	6,42	7,14	6,72	5,60
Palopo	11,6	10,32	10,37	8,83	8,20
Sulawesi Selatan	5,34	4,97	6,31	5,72	4,51

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 1.8 menjelaskan TPT menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. TPT pada kurun waktu tahun 2018-2022. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Pinrang berada pada peringkat 13, dengan nilai sebesar 2,79 persen dan masih dibawah rata-rata TPT Sulawesi Selatan yang mencapai 4,51 persen. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa persentase pengangguran di Kabupaten Pinrang berada di bawah persentase pengangguran rata-rata kabupaten/kota Sulawesi Selatan. Sedangkan, TPT tertinggi berada di Kota Makassar dengan 11,82 persen, Kota Palopo 8,2 persen dan urutan ketiga adalah Kota Parepare dengan 5,60 persen. Kondisi TPT pada tahun 2022 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Secara umum, hal ini menandakan bahwa terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dimana stabilitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan semakin membaik.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kabupaten Pinrang



Perekonomian Kabupaten Pinrang tumbuh sebesar 4,52% pada tahun 2022

PDRB PER KAPITA

57,71 JUTA



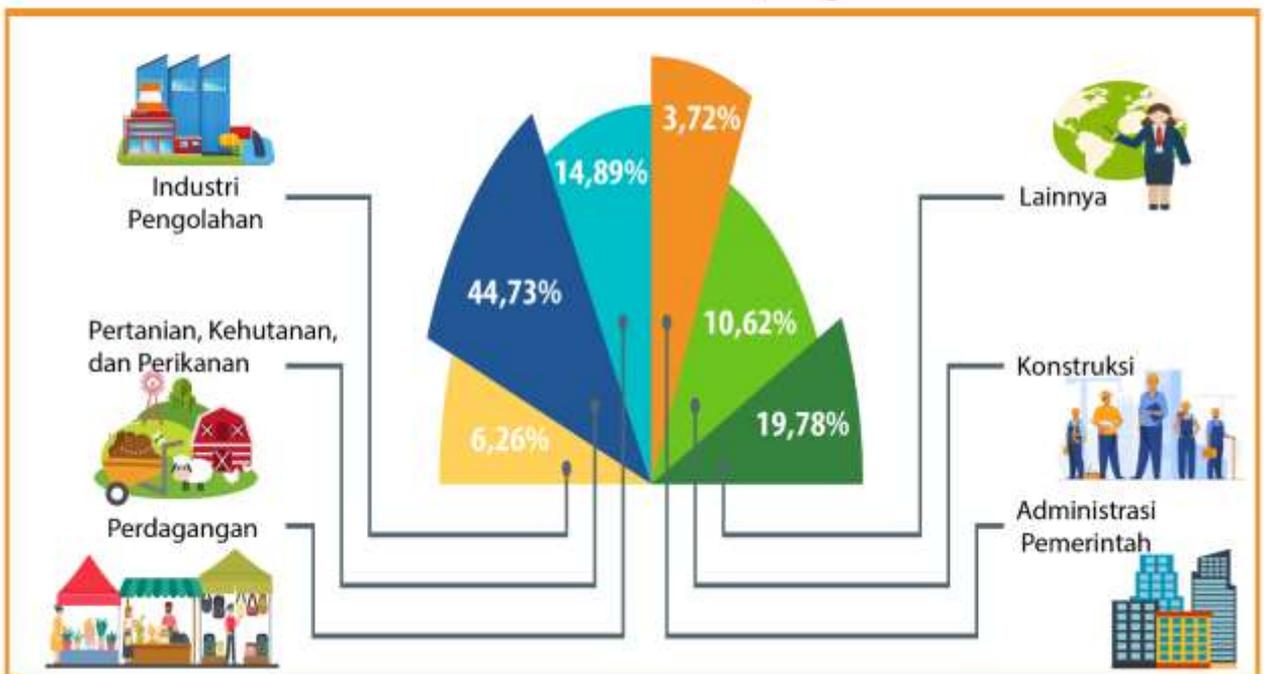
PDRB ADHB

23.765,15 Miliar

PDRB ADHK

14.082,03 Miliar

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

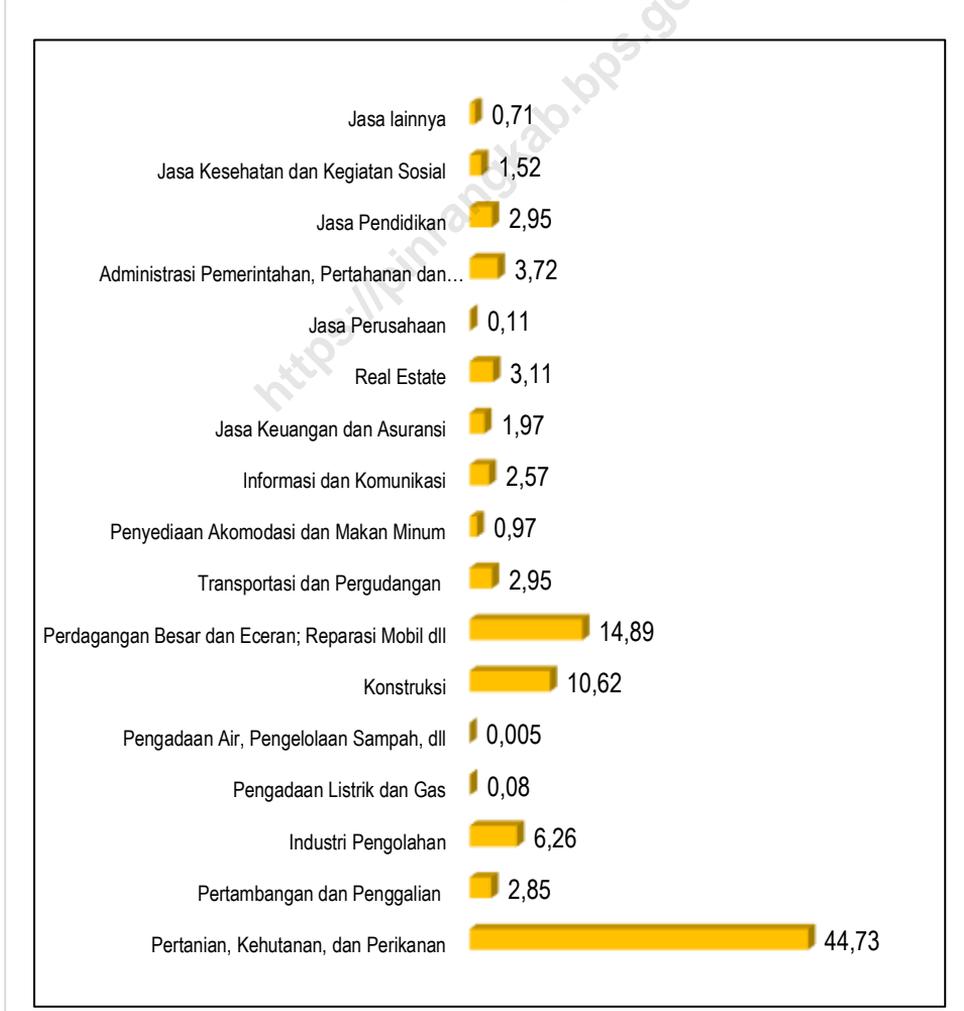


Struktur Ekonomi

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan beraneka ragam data statistik sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar tepat sasaran dalam pembangunan. Strategi dan kebijakan yang telah diambil perlu dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui ketepatan dan keberhasilan dalam pembangunan tersebut. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang bertujuan untuk mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat yang disertai dengan tingkat pemerataan pendapatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah adalah dengan melihat struktur ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB.

Gambar 2.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen)**



Sumber : BPS Pinrang

Tabel 2.1 PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2022)**

Lapangan Usaha		PDRB (Miliar Rp)		Distribusi ADHB (%)
		ADHB	ADHK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.630,00	6.074,26	44,73
B	Pertambangan dan Penggalian	676,20	349,12	2,85
C	Industri Pengolahan	1.486,57	910,85	6,26
D	Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	18,89	18,30	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	1,10	0,80	0,005
F	Konstruksi	2.523,70	1.326,74	10,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.538,60	2.264,08	14,89
H	Transportasi dan Pergudangan	700,91	424,73	2,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	230,48	138,25	0,97
J	Informasi dan Komunikasi	611,31	520,23	2,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	468,00	258,15	1,97
L	Real Estate	737,99	451,15	3,11
M,N	Jasa Perusahaan	25,82	17,59	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	883,34	527,74	3,72
P	Jasa Pendidikan	701,21	468,00	2,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	361,80	225,22	1,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	169,20	106,83	0,71
PDRB		23.765,15	14.082,03	100,00

***) Data sangat sementara

Sumber : BPS Pinrang

Dengan melihat struktur perekonomian Kabupaten Pinrang berupa PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022, sebagai daerah agraris Kabupaten Pinrang masih sangat mengandalkan sumber perekonomian dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 44,73 persen (Gambar 2.1). Kemudian lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan 14,89 persen serta sektor konstruksi yang mencapai 10,62 persen, merupakan penopang dan penggerak perekonomian utama disamping sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (milyar rupiah) dan Laju Pertumbuhan (%) Kabupaten Pinrang Tahun 2021- 2022

Lapangan Usaha (1)	ADHB		ADHK		Laju Pertumbuhan y on y (%) (6)
	2021* (2)	2022** (3)	2021* (4)	2022** (5)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.986,57	10.630,00	6.009,18	6.074,26	1,08
Pertambangan dan Penggalian	604,73	676,20	321,63	349,12	8,55
Industri Pengolahan	1.324,63	1.486,57	829,31	910,85	9,83
Pengadaan Listrik, Gas	17,53	18,89	17,07	18,30	7,17
Pengadaan Air	0,95	1,10	0,70	0,80	13,69
Konstruksi	2.239,87	2.523,70	1.241,39	1.326,74	6,88
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.151,61	3.538,60	2.099,01	2.264,08	7,86
Transportasi dan Pergudangan	527,05	700,91	362,37	424,73	17,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,76	230,48	118,31	138,25	16,85
Informasi dan Komunikasi	558,56	611,31	486,32	520,23	6,97
Jasa Keuangan	438,50	468,00	262,24	258,15	-1,56
Real Estate	690,64	737,99	428,87	451,15	5,20
Jasa Perusahaan	21,43	25,82	15,15	17,59	16,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	886,32	883,34	532,49	527,74	-0,89
Jasa Pendidikan	637,27	701,21	444,02	468,00	5,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	332,29	361,80	206,65	225,22	8,99
Jasa lainnya	147,86	169,20	97,77	106,83	9,26
PDRB Pinrang	21.758,58	23.765,15	13.472,49	14.082,03	4,52
PDRB Sulsel	545.172,68	605.144,68	343.395,41	360.874,18	5,09

***) Data sangat sementara

Sumber : BPS Pinrang

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi, sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman mengalami laju pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya. Sebaliknya, untuk sektor jasa keuangan dan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi pada tahun 2022. Pada tahun 2022, aturan tentang larangan perjalanan sudah mulai longgar sehingga sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 17,21 persen. Sedangkan untuk sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman, banyak masyarakat Kabupaten Pinrang yang mendirikan usaha-usaha baik itu makanan maupun minuman dingin sehingga sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 16,85 persen. Secara umum, PDRB menurut lapangan usaha baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya nilai perubahan dapat dilihat dari nilai laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebesar 4,52 persen yang artinya nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Pinrang tumbuh sebesar 4,52 persen.

Tabel 2.3 PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2022

Lapangan Usaha		PDRB (Miliar Rp)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Distribusi (%)
		ADHB	ADHK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13.520,86	7.957,01	5,92	56,50
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	207,48	111,74	9,01	0,79
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.716,50	951,73	-0,43	6,76
4	Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	8.375,76	5.085,08	8,29	36,11
5	Perubahan Inventori	187,12	153,84	-	1,09
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-242,58	-177,38	-	-1,26
PDRB Kab Pinrang		23.765,15	14.082,03	4,52	100,00
PDRB Sulsel		605.144,68	360.874,18	5,09	

***) Data sangat sementara*

Sumber : BPS Pinrang

Struktur perekonomian Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen pembentuknya. Data empiris PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non Profit yang

Melayani Rumah Tangga (LNPR) dan pemerintah, dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori.

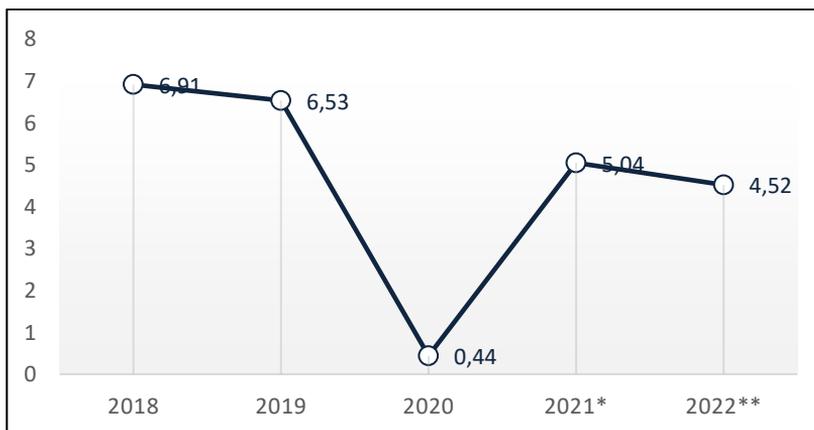
Berdasarkan Tabel 2.3, selama tahun 2022 PDRB Kabupaten Pinrang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) yaitu sebesar 56,50 persen dengan laju pertumbuhan 5,92 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang besar yaitu 36,11 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 8,29 persen. Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi LNPR kontribusi relatif kecil dengan kontribusi sebesar 0,79 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,79 persen.

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) terhadap PDRB sebesar 6,76 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2022 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasikan oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Hal ini terlihat dari net ekspor dan impor bernilai negatif dengan kontribusi sebesar -1,26 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah (impor).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2018-2019, pertumbuhan ekonomi masih dalam rentang 6-7 persen. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,44 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membuat sebagian besar sektor ekonomi lumpuh. Pada tahun 2022, kondisi perekonomian Kabupaten Pinrang sudah mulai membaik dilihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52 persen.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 - 2022 (Persen)



*) Data sementara

**) Data sangat sementara

Sumber : BPS Pinrang

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan per Tahun				
	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Selayar	8,75	7,68	-1,78	4,02	3,67
Bulukumba	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81
Bantaeng	8,13	10,75	0,52	8,86	15,45
Jeneponto	6,29	5,47	0,16	5,40	3,81
Takalar	6,66	6,87	-0,61	5,05	4,64
Gowa	7,14	7,46	1,76	7,26	4,59
Sinjai	7,44	6,12	1,55	5,23	4,87
Maros	6,19	1,24	-10,87	1,36	9,13
Pangkep	4,76	6,41	-1,69	3,46	4,93
Barru	7,11	7,41	0,87	4,77	5,11
Bone	8,91	7,01	-0,25	5,53	5,23
Soppeng	8,11	7,69	2,19	6,15	6,18
Wajo	1,08	4,06	-1,17	6,77	2,38
Sidrap	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,86
Pinrang	6,91	6,53	0,44	5,04	4,52
Enrekang	3,26	5,43	1,25	6,36	3,71
Luwu	6,86	6,26	1,30	6,03	5,69
Tana Toraja	7,89	7,22	-0,28	5,19	5,12
Luwu Utara	8,39	7,11	-0,59	3,90	4,54
Luwu Timur	3,39	1,17	1,46	-1,39	1,99
Toraja Utara	8,07	7,56	0,17	4,05	5,27
Makassar	8,42	8,79	-1,27	4,47	5,40
Parepare	5,58	6,65	-0,08	4,41	5,93
Palopo	7,52	6,75	0,45	5,41	5,83
Sulawesi Selatan	7,06	6,92	-0,71	4,65	5,09

^{*)} Data sementara

^{**)} Data sangat sementara

Sumber : BPS Pinrang

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang sebesar 4,52 persen yang menduduki posisi ke-18 setelah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Luwu Utara. Angka tersebut masih berada di bawah laju pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 5,09 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Bantaeng sebesar 15,45 persen dan untuk pertumbuhan ekonomi terendah berada di Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,99 persen.

Tabel 2.5 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB Per kapita				
	2018	2019	2020	2021 ^(*)	2022 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Selayar	43,62	47,99	46,73	49,54	53,76
Bulukumba	31,55	33,96	33,34	36,06	38,88
Bantaeng	41,63	46,84	45,68	50,95	61,00
Jeneponto	26,03	27,74	25,70	27,26	28,69
Takalar	31,51	34,42	34,03	36,76	40,18
Gowa	25,07	27,50	28,20	30,44	32,70
Sinjai	41,88	45,05	43,74	47,05	51,29
Maros	60,92	64,60	47,73	47,88	58,31
Pangkep	71,98	77,68	74,38	79,19	86,74
Barru	38,09	41,80	40,36	43,43	47,50
Bone	43,87	47,81	45,68	48,80	53,67
Soppeng	44,12	47,83	48,42	52,75	58,22
Wajo	47,15	49,31	52,16	58,83	64,14
Sidrap	43,25	46,49	44,12	47,19	51,00
Pinrang	48,29	52,10	49,84	53,41	57,71
Enrekang	32,81	35,28	33,54	36,06	39,13
Luwu	40,2	43,04	43,91	48,55	54,03
Tana Toraja	29,31	31,66	27,10	28,36	30,09
Luwu Utara	38,65	41,65	41,07	44,33	48,96
Luwu Timur	69,41	71,34	72,85	78,58	92,98
Toraja Utara	37,84	41,08	37,37	39,16	42,18
Makassar	106,23	117,30	125,32	133,31	145,89
Parepare	45,94	50,06	48,50	51,18	56,16
Palopo	40,32	43,79	43,66	46,52	51,18
Sulawesi Selatan	52,64	57,18	55,68	59,66	65,59

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Sedangkan pada Tabel 2.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, PDRB perkapita Kabupaten Pinrang berada pada peringkat ke delapan se-Sulawesi Selatan yaitu sebesar 57,71 juta rupiah setelah Kabupaten Soppeng, meskipun begitu PDRB perkapita tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 65,59 juta rupiah. PDRB perkapita tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 145,89 juta rupiah dan terendah berada di Kabupaten Jeneponto sebesar 28,69 juta rupiah.

Tabel 2.6 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan Tahun 2021-2022 (miliar rupiah)

Kabupaten /Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Selayar	6.835,40	7.480,47	3.765,56	3.903,80
Bulukumba	15.868,86	17.233,31	9.013,58	9.357,11
Bantaeng	10.081,40	12.164,14	6.151,45	7.102,04
Jeneponto	11.053,25	11.779,83	7.058,35	7.327,53
Takalar	11.126,11	12.257,05	6.908,05	7.228,40
Gowa	23.536,84	25.611,85	15.043,70	15.734,85
Sinjai	12.297,08	13.530,37	7.576,83	7.945,62
Maros	19.005,61	23.544,30	12.400,62	13.532,96
Pangkep	27.574,74	30.481,86	17.500,61	18.363,59
Barru	8.057,26	8.878,37	5.069,99	5.329,31
Bone	39.369,96	43.640,84	23.273,87	24.491,73
Soppeng	12.426,78	13.741,84	7.585,98	8.054,42
Wajo	22.319,74	24.352,78	13.569,28	13.891,79
Sidrap	15.250,13	16.699,00	8.866,07	9.297,02
Pinrang	21.758,58	23.765,15	13.472,49	14.082,03
Enrekang	8.204,11	9.025,31	4.884,37	5.065,36
Luwu	17.839,99	19.980,97	10.449,75	11.044,67
Tana Toraja	8.087,09	8.757,44	4.780,98	5.025,78
Luwu Utara	14.408,38	16.050,74	8.491,50	8.876,97
Luwu Timur	23.614,52	28.407,91	16.030,50	16.349,57
Toraja Utara	10.344,30	11.311,31	5.357,13	5.639,38
Makassar	190.318,07	208.935,79	126.312,83	133.132,60
Parepare	7.826,24	8.697,28	5.162,10	5.468,43
Palopo	8.714,31	9.767,89	5.768,28	6.104,74
Sulawesi Selatan	545.172,68	605.144,68	343.395,41	360.874,18

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Sedangkan, berdasarkan keterbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pinrang menduduki posisi ketujuh PDRB tertinggi se-Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pinrang menduduki posisi keenam PDRB tertinggi se-Provinsi Sulawesi Selatan berada tepat di atas Kabupaten Maros yang berada pada posisi kedelapan dan di bawah Kabupaten Wajo yang berada pada posisi kelima pada tahun 2022. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tertinggi berada di Kota Makassar dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.7 Peranan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2022 (Persen)

Kabupaten/Kota (1)	Peranan/Share		Rank Share	
	2010 (2)	2022 ^{a)} (3)	2010 (4)	2022 ^{a)} (5)
Kep. Selayar	1,05	1,23	24	24
Bulukumba	2,76	2,84	10	10
Bantaeng	1,57	2,01	18	16
Jeneponto	2,07	1,94	15	17
Takalar	1,93	2,02	16	15
Gowa	4,15	4,23	7	5
Sinjai	2,20	2,23	13	14
Maros	4,26	3,88	6	8
Pangkep	5,04	5,03	4	3
Barru	1,49	1,46	21	21
Bone	6,44	7,20	3	2
Soppeng	2,16	2,27	14	13
Wajo	4,38	4,02	5	6
Sidrap	2,58	2,76	11	11
Pinrang	3,84	3,92	8	7
Enrekang	1,52	1,49	20	20
Luwu	2,98	3,3	9	9
Tana Toraja	1,39	1,44	23	22
Luwu Utara	2,48	2,65	12	12
Luwu Timur	6,89	4,69	2	4
Toraja Utara	1,46	1,87	22	18
Makassar	34,10	34,47	1	1
Parepare	1,55	1,43	19	23
Palopo	1,70	1,61	17	19

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk *share* terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang tercatat pada tahun 2010 mempunyai *share* sebesar 3,84 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 3,92 persen. Ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Pinrang semakin meningkat. Peringkat Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari peringkat 8 pada tahun 2010 menjadi peringkat 7 pada tahun 2022 se-Provinsi Sulawesi Selatan (Tabel 2.8). *Share* terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi berada di Kota Makassar dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang



Angka Harapan Hidup

**70,15
Tahun**

secara rata-rata bayi yang baru lahir tahun 2022 memiliki peluang bertahan hidup 70,15 tahun



**IPM
71,97**

Standar Hidup Layak

Pengeluaran Penduduk Perkapita Disesuaikan

Rp 12.102.000,-



secara rata-rata pengeluaran penduduk perkapita disesuaikan selama setahun adalah Rp 12.102.000,-

Harapan Lama Sekolah

secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang bersekolah selama 13,25 tahun.

13,25



Indeks Pembangunan Gender

IPG 95,36



74,39

70,94

Rata-rata Lama Sekolah

**8,04
Tahun**

rata-rata jenjang yang pernah diduduki oleh seseorang pada tahun 2022 adalah 8,04 tahun atau setara dengan kelas 8 SMP

Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai daerah yang cukup besar, Kabupaten Pinrang tidak terlepas melakukan upaya pembangunan namun pada kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya mensinergikan antara Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat maka perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya mengedepankan pembangunan di bidang ekonomi ataupun pemenuhan sarana dan prasarana, melainkan juga harus melibatkan pelaku pembangunan atau dalam hal ini adalah masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai SDM yang unggul agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, nampaknya mulai dikesampingkan dikarenakan disparitas kota/desa sangat berpengaruh. Oleh karenanya sudut pandang pembangunan manusia dapat memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan. Sehingga SDM tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga harus diperhatikan aspek kualitas.

Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam usaha meningkatkan kualitas manusia, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan atau daya beli maupun aspek moralitas. Tidak dipungkiri berbagai upaya tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan utama yaitu menciptakan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan bukan perkara mudah karena mencakup segi-segi kehidupan yang kompleks maka diperlukan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia. Alat ukur inilah yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara konseptual IPM adalah alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari suatu wilayah yang terdiri dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*a decent standard of living*). Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Dengan semakin berkembangnya teknik perhitungan IPM yang akan lebih mengakomodir kelemahan yang ada, maka pada tahun 2010 *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tepatnya pada tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi IPM dan hasilnya pada tahun yang sama UNDP mencatat beberapa negara yang mengalami kemajuan tercepat dalam peningkatan IPM. Tercatat Indonesia dalam kurun waktu 1970-2010 termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement*. IPM

Indonesia tahun 2022 sebesar 72,91 (kategori tinggi) meningkat 0,62 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,29.

Selanjutnya Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI), juga mempunyai peran penting dalam pembentukan IPM Indonesia. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup baik. Oleh karenanya menarik untuk melihat aspek atau komponen-komponen pembentuk IPM di Kabupaten Pinrang secara rinci pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 IPM dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Harapan Hidup (tahun)	68,98	69,39	69,61	69,77	70,15
Harapan Lama Sekolah	13,20	13,22	13,23	13,24	13,25
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,84	7,85	7,86	7,87	8,04
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	11.508	11.828	11.844	11.956	12.102
IPM	70,62	71,12	71,26	71,45	71,97

Sumber : BPS Pinrang

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Indikator yang menggambarkan dimensi ini adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Selain itu, UHH juga digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan.

Sejak tahun 2018-2022 UHH Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah telah berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022, UHH Kabupaten Pinrang sebesar 70,15 tahun yang artinya bayi yang baru dilahirkan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 diperkirakan akan bertahan hidup hingga umur 70 sampai 71 tahun (Tabel 3.1).

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2022, RLS sebesar 8,04 tahun yang artinya

rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas Kabupaten Pinrang bersekolah sampai dengan 8 tahun yang bisa diartikan sampai kelas 2 SMP. Karena semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Namun setidaknya dalam kurun waktu 2018-2022 telah menunjukkan tren kearah positif, yang artinya berbagai program pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan RLS ini berjalan.

Sedangkan, harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu pada masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Seperti halnya RLS, HLS juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Pada tahun 2022, HLS sebesar 13,25 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang mengharapkan akan sekolah hingga tamat SMA dan menduduki perguruan tinggi walaupun tidak sampai tamat (Tabel 3.1).

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi selanjutnya dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (PPP).

Pada tahun 2022 menunjukan bahwa pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar Rp.12.102.000,-(Tabel 3.1). Yang artinya pengeluaran perkapita disesuaikan penduduk di Kabupaten Pinrang cukup tinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari lokasi yang dekat dengan kota-kota penyangga seperti kota Parepare dan Makassar. Akses yang mudah dan budaya masyarakat bugis yang konsumtif menyebabkan paritas daya beli juga tinggi.

Berdasarkan beberapa indikator yang telah disebutkan sebelumnya diperoleh nilai IPM Kabupaten Pinrang tahun 2022 adalah sebesar 71,97. Apabila mengacu pada skala internasional, sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 IPM Kabupaten Pinrang masih stagnan pada kategori IPM sedang karena nilai IPM nya kurang dari 70. Akan tetapi, sejak tahun 2018-2022 IPM Kabupaten Pinrang berada pada kategori tinggi (Gambar 3.1). Tumbuhnya berbagai pusat bisnis dan pertanian ternyata mampu mempertahankan IPM Kabupaten Pinrang kearah yang lebih baik, terbukti saat ini sudah mencapai 71-72. Secara umum, proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang sudah cukup baik. Meskipun demikian karena manusia selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan kehidupan, maka masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Pinrang.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2022



Sumber : BPS Pinrang

Pada Gambar 3.1, menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Pinrang selama sepuluh tahun terakhir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam sepuluh tahun terakhir IPM Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan sebesar 3,83 poin.

Tabel 3.2 IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Peringkat IPM 2022	Laju IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kep. Selayar	66,04	66,91	67,38	67,76	68,35	20	0,87
Bulukumba	67,70	68,28	68,99	69,62	70,34	14	1,04
Bantaeng	67,76	68,30	68,73	68,99	69,69	19	1,02
Jeneponto	63,33	64,00	64,26	64,56	65,13	24	0,89
Takalar	66,07	66,94	67,31	67,72	68,31	22	0,88
Gowa	68,87	69,66	70,14	70,29	70,99	11	0,99
Sinjai	66,24	67,05	67,60	67,75	68,33	21	0,85
Maros	68,94	69,50	69,86	70,41	71,00	10	0,84
Pangkep	67,71	68,29	68,72	69,21	69,79	17	0,83
Barru	70,05	70,60	71,00	71,13	71,53	8	0,56
Bone	65,04	65,67	66,06	66,40	67,01	23	0,91
Soppeng	67,60	68,26	68,67	68,99	69,70	18	1,03
Wajo	68,57	69,05	69,15	69,62	70,26	15	0,92
Sidrap	70,60	71,05	71,21	71,54	72,06	6	0,73
Pinrang	70,62	71,12	71,26	71,45	71,97	7	0,73
Enrekang	72,15	72,66	72,76	72,91	73,39	5	0,66
Luwu	69,60	70,39	70,51	70,85	71,36	9	0,72
Tana Toraja	67,66	68,25	68,75	69,49	69,88	16	0,57
Luwu Utara	68,79	69,46	69,57	70,02	70,51	12	0,69

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Peringkat IPM 2022	Laju IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Luwu Timur	72,16	72,80	73,22	73,34	73,92	4	0,79
Toraja Utara	68,49	69,23	69,33	69,75	70,36	13	0,88
Makassar	81,73	82,25	82,25	82,66	83,12	1	0,56
Parepare	77,19	77,62	77,86	78,21	78,54	3	0,42
Palopo	77,30	77,98	78,06	78,38	78,91	2	0,67
Sulawesi Selatan	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82		0,81

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebesar 71,97 yang menduduki posisi ketujuh tertinggi se-Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun begitu, Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 72,82. Untuk IPM tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 83,12. Kemudian disusul oleh Kota Palopo sebesar 78,91 dan Kota Parepare sebesar 78,54 dan untuk IPM terendah berada di Kabupaten Jeneponto sebesar 65,13. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan IPM, Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,04 persen.

Tabel 3.3 Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 - 2022

Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kep. Selayar	68,52	68,81	12,66	12,67	8,08	8,09	9.060	9.446
Bulukumba	68,10	68,51	13,41	13,42	7,82	8,01	10.632	10.941
Bantaeng	70,60	70,88	12,05	12,30	6,77	6,81	11.829	12.133
Jeneponto	66,49	66,81	12,10	12,11	6,60	6,75	9.215	9.425
Takalar	67,30	67,64	12,42	12,48	7,49	7,64	10.543	10.746
Gowa	70,45	70,70	13,65	13,66	8,20	8,40	9.504	9.812
Sinjai	67,38	67,68	13,06	13,25	7,78	7,79	9.505	9.726
Maros	69,04	69,28	13,16	13,30	8,01	8,02	11.032	11.403
Pangkep	66,78	67,12	12,77	12,78	7,92	8,05	11.519	11.817
Barru	69,07	69,35	13,59	13,61	8,24	8,25	11.017	11.275
Bone	67,21	67,57	12,98	12,99	7,23	7,36	9.030	9.277
Soppeng	69,81	70,20	13,05	13,20	7,82	7,96	9.558	9.756
Wajo	67,48	67,82	13,15	13,30	7,05	7,16	12.505	12.729
Sidrap	70,01	70,41	12,95	13,01	7,94	8,04	12.201	12.379

Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
Pinrang	69,77	70,15	13,24	13,25	7,87	8,04	11.956	12.102
Enrekang	70,93	71,17	13,71	13,86	8,91	8,93	10.973	11.183
Luwu	70,44	70,75	13,39	13,40	8,35	8,48	10.116	10.308
Tana Toraja	73,40	73,72	13,86	13,87	8,51	8,52	7.434	7.584
Luwu Utara	68,67	69,03	12,57	12,58	7,86	7,87	11.736	12.105
Luwu Timur	70,63	70,94	12,84	13,00	8,81	8,92	12.886	13.058
Toraja Utara	73,41	73,65	13,39	13,41	8,25	8,26	8.134	8.494
Makassar	72,13	72,40	15,58	15,59	11,43	11,55	17.097	17.406
Parepare	71,31	71,57	14,51	14,52	10,65	10,66	13.786	14.027
Palopo	70,92	71,18	15,09	15,10	10,94	11,09	13.117	13.404
Sulsel	70,66	70,97	13,52	13,53	8,46	8,63	11.184	11.430

Sumber : BPS Pinrang

Secara umum, IPM kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori tinggi pada tahun 2022, tetapi nilai tersebut lebih rendah dari IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan nilai komponen penyusun IPM seperti UHH sebesar 70,15 tahun 2022 sedangkan UHH provinsi sebesar 70,97 tahun. Untuk HLS Kabupaten Pinrang sebesar 13,25 tahun masih berada di bawah HLS Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 13,53 tahun dan RLS Kabupaten Pinrang sebesar 8,04 juga masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,63. Selanjutnya, pada komponen daya beli yang ditunjukkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan bahwa nilai pengeluaran perkapita disesuaikan kabupaten Pinrang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rp. 12.102.000,- sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar Rp. 11.430.000,- (Tabel 3.3).

Dengan UHH yang berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang dapat lebih meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat sejahtera dengan memiliki umur yang panjang dan sehat.

Kendati data RLS dan HLS di Kabupaten Pinrang sudah menunjukkan kearah yang positif bukan berarti pemerintah berpuas akan pencapaian tersebut. HLS merupakan pemicu (*booster*) bagi peningkatan pembangunan manusia di bidang pendidikan. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk lebih meningkatkan lagi sarana prasarana serta kualitas pendidikan agar yang berdampak pula pada pembangunan manusia yang baik di bidang pendidikan.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Kabupaten Pinrang menduduki peringkat ketujuh tertinggi dalam pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menjadikan pemerintah Kabupaten Pinrang hendaknya tetap mawas diri dan tetap terus melakukan upaya-upaya pembangunan dengan lebih meningkatkan kualitas pembangunan tidak hanya kuantitasnya

saja. Sehingga, kedepannya pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang semakin baik yang ditunjukkan dengan terus meningkatnya nilai IPM.

Selain pembangunan manusia, Kabupaten Pinrang juga perlu memperhatikan mengenai kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan baik pada bidang ekonomi, sosial-budaya maupun politik.

Namun IPM nyatanya belum mempertimbangkan ketimpangan gender sehingga UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018 – 2022

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
						IPM LK	IPM PR
Kep. Selayar	91,96	91,92	91,63	91,50	91,73	73,42	67,35
Bulukumba	96,45	96,59	96,29	95,80	95,95	72,87	69,92
Bantaeng	95,30	95,31	95,78	95,76	95,35	70,61	67,33
Jeneponto	91,30	91,64	91,46	91,60	92,00	69,28	63,74
Takalar	87,24	87,29	87,56	87,45	87,66	72,60	63,64
Gowa	87,24	87,19	87,17	87,37	87,83	75,51	66,32
Sinjai	98,13	98,20	98,02	97,81	98,13	69,35	68,05
Maros	88,93	89,10	89,23	89,20	89,46	75,72	67,74
Pangkep	89,80	90,16	89,85	89,97	90,61	74,53	67,53
Barru	95,44	95,42	95,52	95,51	95,64	74,31	71,07
Bone	92,95	93,25	92,89	92,71	93,34	70,44	65,75
Soppeng	97,25	97,08	97,26	97,25	97,06	71,20	69,11
Wajo	90,04	90,13	90,25	90,44	90,33	74,79	67,56
Sidrap	91,90	92,08	92,06	92,20	92,57	75,94	70,30
Pinrang	95,45	95,35	95,16	95,11	95,36	74,39	70,94
Enrekang	97,99	97,31	97,41	97,40	97,91	74,27	72,72
Luwu	92,28	92,00	92,16	92,58	92,79	74,76	69,37
Tana Toraja	87,86	88,18	87,97	88,46	88,48	74,37	65,80
Luwu Utara	88,94	89,21	89,20	89,44	90,00	74,03	66,63
Luwu Timur	89,38	89,61	89,71	89,80	90,34	78,08	70,54
Toraja Utara	86,38	86,78	86,83	86,80	87,32	74,55	65,10
Makassar	94,53	94,48	94,47	94,44	94,52	85,36	80,68

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
						IPM LK	IPM PR
Parepare	96,87	96,78	96,88	96,73	96,76	80,33	77,73
Palopo	97,75	97,35	97,32	97,31	97,58	80,25	78,31
Sulawesi Selatan	93,15	93,09	92,86	92,85	93,14	76,72	71,46

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada Tahun 2022, Kabupaten Pinrang IPM laki-laki sebesar 74,39 dan IPM perempuan sebesar 70,94. Secara umum kualitas perempuan masih berada di belakang dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun begitu, kedua IPM tersebut termasuk ke dalam kategori tinggi. Akan tetapi dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi pendorong peningkatan IPG selama beberapa tahun. Sejak tahun 2013, IPG sudah melebihi angka 90, dan di tahun 2022 nilainya sudah mencapai 95,36.

Capaian IPM yang tinggi tidak serta merta memberikan IPG yang tinggi. Meskipun IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah sudah berada pada level yang tinggi, jika tidak setara maka akan memberikan IPG yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya, IPG yang lebih tinggi dapat terjadi pada wilayah yang memiliki IPM laki-laki dan perempuan yang lebih rendah namun setara. Hal ini terjadi pada kasus Kabupaten Pinrang yaitu IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Soppeng, namun nilai IPG Kabupaten Soppeng lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pinrang. Penyebabnya adalah gap antara IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pinrang lebih besar dibandingkan Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 (Tabel 3.4).

Berbagai upaya untuk mendorong kapabilitas perempuan Indonesia di segala bidang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui produk-produk hukum yang lebih memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi. Selain meningkatkan kemampuan dasar seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan juga memperjuangkan peningkatan jumlah peran perempuan dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah membangun kerjasama antar kementerian dan menyusun anggaran yang responsif gender. Disamping itu untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di daerah, Pemerintah Daerah harus melaksanakannya sesuai amanat UU Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan sinergi yang baik antara program pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemberdayaan perempuan di Indonesia menjadi lebih nyata dan menyeluruh. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut tidak terkecuali Kabupaten Pinrang, sehingga pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi sangat penting.

**Tabel 3.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2022**

Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022			
				Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kep. Selayar	68,03	70,06	68,07	20,00	61,96	32,22	68,71
Bulukumba	69,89	68,22	67,10	17,50	55,90	35,10	70,32
Bantaeng	80,27	80,26	81,20	32,00	61,81	37,05	80,21
Jeneponto	68,04	68,24	68,68	20,00	61,35	31,89	68,94
Takalar	70,66	68,78	70,67	30,00	48,72	27,81	73,39
Gowa	78,31	77,97	79,71	28,89	42,98	34,23	78,35
Sinjai	72,48	73,46	73,59	26,67	61,16	33,72	73,78
Maros	69,93	72,43	72,38	25,71	51,61	26,42	71,63
Pangkep	57,03	59,44	59,94	14,29	56,12	31,57	64,12
Barru	63,41	63,96	63,98	20,00	57,63	26,62	65,24
Bone	58,55	56,68	57,55	8,89	61,03	32,38	59,09
Soppeng	71,45	71,15	70,54	23,33	65,63	34,26	71,07
Wajo	55,09	56,24	56,30	10,00	64,28	28,27	55,83
Sidrap	56,80	56,86	56,39	8,57	56,24	29,16	56,71
Pinrang	67,92	68,11	68,43	15,00	66,27	34,38	65,12
Enrekang	58,28	60,32	56,51	10,00	61,89	37,47	62,98
Luwu	55,89	57,15	57,29	5,71	61,46	36,48	58,03
Tana Toraja	69,32	68,50	68,77	13,33	51,18	42,87	70,68
Luwu Utara	38,92	38,11	41,11	2,86	49,76	20,56	43,96
Luwu Timur	50,76	50,76	54,09	10,00	48,77	23,56	55,40
Toraja Utara	62,58	60,98	62,73	10,00	48,44	35,84	64,21
Makassar	78,32	77,61	76,59	26,00	45,76	35,53	78,15
Parepare	73,86	74,06	70,86	20,00	49,47	31,96	71,21
Palopo	77,53	77,47	78,45	28,00	48,13	34,18	79,10
Sulawesi Selatan	76,01	76,32	74,76	27,06	52,99	32,43	76,37

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

IDG Kabupaten Pinrang menempati urutan ke-15 pada tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai IDG sebesar 65,12 persen. Posisi ini berada ditengah-tengah jika dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun begitu nilai tersebut masih di bawah IDG Sulawesi Selatan yang sebesar 76,37. Sedangkan untuk IDG tertinggi berada pada Kabupaten Bantaeng sebesar 80,21 persen dan terendah berada pada Kabupaten Luwu Utara sebesar 43,96 persen.

IDG Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 menjadi 68,43 persen akan tetapi pada tahun 2022 IDG Kabupaten Pinrang mengalami penurunan

menjadi 65,12 persen. Hal ini menandakan upaya pemberdayaan perempuan mengalami hambatan. Hal ini terbukti pada indikator penyusun IDG seperti keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 15 persen, dan perempuan sebagai tenaga professional sebesar 66,27 persen serta sumbangan pendapatan perempuan sebesar 34,38 persen. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang politik dan ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain karena masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan. Perempuan tidak memiliki daya saing secara finansial, perempuan memiliki kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk keranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki (UNDP, 2010). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas perempuan merupakan hal yang mendesak sehingga mampu mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran perempuan pada semua bidang pembangunan.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KEMISKINAN



Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran

Garis Kemiskinan

Batas minum untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan di Kabupaten Pinrang sebesar Rp. 366.808,- per kapita per bulan

Rp 366.808,-
Per Kapita
Per Bulan



P1
Kedalaman Kemiskinan

1,06



P2
Keparahan Kemiskinan

0,20



Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang sebesar 8,79 persen atau sekitar 33.640 penduduk.

8,79%



Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan berpotensi bertambah pula permasalahan sosial salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Oleh karenanya BPS konsisten sejak tahun 1984 menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yang data utamanya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Salah satu pendekatan untuk mengukur jumlah dan persentase penduduk miskin adalah dengan pendekatan kebutuhan dasar. Dalam menghitung angka kemiskinan melalui komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Mulai tahun 1998 pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS telah dilakukan penyempurnaan, yaitu jumlah komponen kebutuhan dasar terdiri atas 52 jenis komoditi makanan dan 51 komoditi bukan makanan di daerah perkotaan dan 47 komoditi di daerah perdesaan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai Garis Kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4.1 Statistik Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2022

Kegiatan (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)
Jumlah Penduduk Miskin (000)	32,94	31,85	33,56	33,51	33,64
Persentase Penduduk Miskin	8,81	8,46	8,86	8,81	8,79
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	280.746	294.349	338.731	345.892	366.808

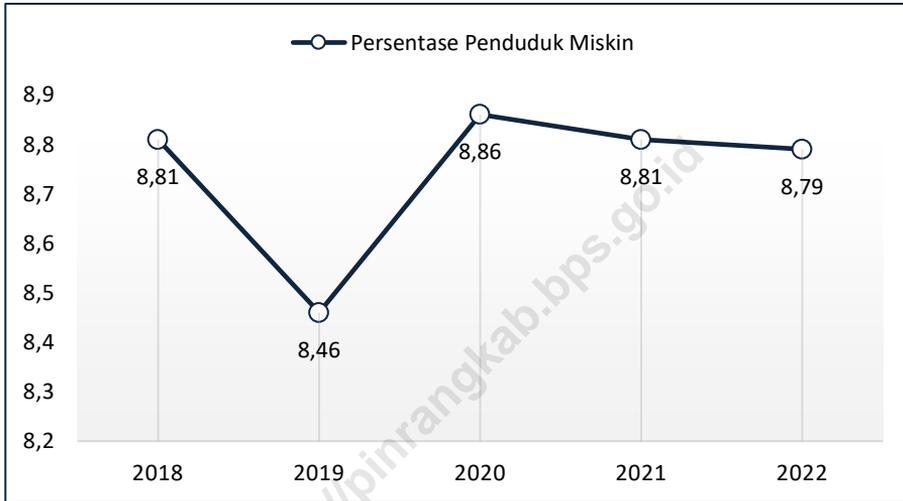
Sumber : BPS Pinrang

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang pada periode tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 4.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan jumlah dan persentase kemiskinan di Kabupaten Pinrang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin sebesar 8,79 persen yang relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti penambahan penduduk yang lebih cepat belum diiringi dengan tingkat kesejahteraan

yang sesuai. Pemerintah Kabupaten Pinrang harus lebih mengoptimalkan berbagai kebijakan dalam menangani kemiskinan agar pertambahan penduduk yang terjadi tidak membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.

Sedangkan, garis kemiskinan pada tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 280.746,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 366.808,- pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan akan meningkatnya harga-harga dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang berdampak pada kelompok masyarakat yang dikelompokkan 'miskin' diharapkan turun dengan beranggapan faktor-faktor lainnya tidak diikutsertakan.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pinrang

Beberapa indikator tentang kemiskinan selama dua tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 4.2 yang menampilkan jumlah, persentase, tingkat kedalaman kemiskinan (P1), keparahan kemiskinan (P2) dan gini rasio pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Tabel 4.2 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022

Kabupaten/ Kota	2021					2022				
	Jumlah (ribu)	%	P1	P2	Gini rasio	Jumlah (ribu)	%	P1	P2	Gini rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kep. Selayar	17,04	12,45	2,09	0,46	0,354	16,74	12,24	2,15	0,57	0,350
Bulukumba	30,00	7,43	1,00	0,20	0,362	31,29	7,39	0,99	0,22	0,361
Bantaeng	16,84	9,41	1,23	0,27	0,332	17,22	9,07	1,32	0,38	0,320
Jeneponto	53,24	14,28	1,64	0,29	0,353	50,59	13,73	2,54	0,70	0,338
Takalar	25,38	8,25	1,03	0,17	0,368	24,75	8,25	0,88	0,15	0,375
Gowa	57,68	7,54	1,38	0,36	0,358	57,96	7,36	1,13	0,32	0,364
Sinjai	22,06	8,84	1,45	0,30	0,384	21,67	8,80	1,19	0,25	0,357
Maros	34,62	9,57	1,61	0,41	0,365	33,90	9,43	1,77	0,44	0,362

Kabupaten/ Kota	2021					2022				
	Jumlah (ribu)	%	P1	P2	Gini rasio	Jumlah (ribu)	%	P1	P2	Gini rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pangkep	47,12	14,28	2,78	0,78	0,363	47,53	13,92	2,09	0,49	0,334
Barru	14,44	8,68	1,52	0,39	0,359	14,73	8,40	0,98	0,15	0,366
Bone	81,33	10,52	1,67	0,42	0,383	80,34	10,58	1,35	0,26	0,376
Soppeng	17,23	7,53	1,24	0,28	0,406	17,21	7,49	0,91	0,21	0,386
Wajo	27,69	6,46	0,79	0,15	0,361	26,75	6,57	0,86	0,21	0,375
Sidrap	15,36	5,04	0,64	0,13	0,358	15,56	5,11	0,86	0,20	0,354
Pinrang	33,56	8,81	1,77	0,50	0,367	33,64	8,79	1,06	0,20	0,363
Enrekang	25,25	12,47	1,35	0,24	0,362	26,15	12,39	1,97	0,49	0,346
Luwu	46,04	12,53	1,77	0,46	0,375	46,50	12,49	1,90	0,39	0,364
Tana Toraja	28,41	12,27	1,66	0,36	0,378	29,31	12,18	1,30	0,22	0,355
Luwu Utara	42,20	13,59	2,07	0,49	0,341	42,29	13,22	2,26	0,55	0,349
Luwu Timur	20,82	6,94	1,09	0,26	0,396	20,89	6,81	0,80	0,16	0,394
Toraja Utara	27,88	11,99	1,83	0,39	0,372	27,79	11,65	1,70	0,36	0,356
Makassar	69,98	4,82	0,76	0,16	0,400	71,83	4,58	0,80	0,19	0,395
Parepare	7,96	5,40	0,72	0,13	0,381	8,01	5,41	0,56	0,09	0,379
Palopo	14,71	8,14	1,17	0,30	0,358	14,78	7,78	1,43	0,35	0,371
Sulsel	776,83	8,78	1,49	0,37	0,382	777,44	8,63	1,36	0,32	0,377

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Telah disebutkan sebelumnya, jika masalah kemiskinan tidak hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, melainkan terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode tahun 2021-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dari 1,77 pada tahun 2021 menjadi 1,06 pada tahun 2022. Dapat diartikan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan (kesenjangan/ketimpangan) pada tahun 2022 relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan pada tahun 2021.

Selanjutnya, indeks Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sama dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,50 pada tahun 2021 menjadi 0,20 tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tahun 2022 memiliki ketimpangan yang lebih rendah dibanding tahun 2021. Sedangkan untuk gini rasio mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang semula 0,367 pada tahun 2021 menjadi 0,363 pada tahun 2022. Artinya

distribusi pengeluaran di Kabupaten Pinrang memiliki tingkat ketimpangan pengeluaran yang lebih rendah.

Sedangkan, berdasarkan persentase kemiskinan Kabupaten Pinrang menduduki posisi ke tiga belas se-Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase kemiskinan Kabupaten Pinrang sebesar 8,79 persen lebih tinggi dibandingkan persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,63 persen. Persentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Pangkep Kepulauan sebesar 13,92 persen dan terendah berada di Kota Makassar sebesar 4,58 persen.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Pinrang, 2020. Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang 2020. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- BPS Kabupaten Pinrang, 2021. Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang 2021. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- BPS Kabupaten Pinrang, 2022. Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2022. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- BPS Kabupaten Pinrang, 2023. Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2023. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- _____,2023. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2022
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 1-4 2022. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2018-2022. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18 Pinrang 91211

Telp: (0421) 921021 Fax : (0421) 921021

Homepage: <https://pinrangkab.bps.go.id>, Email: bps7315@bps.go.id

ISSN 2797-2771



9

772797

277002